 RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

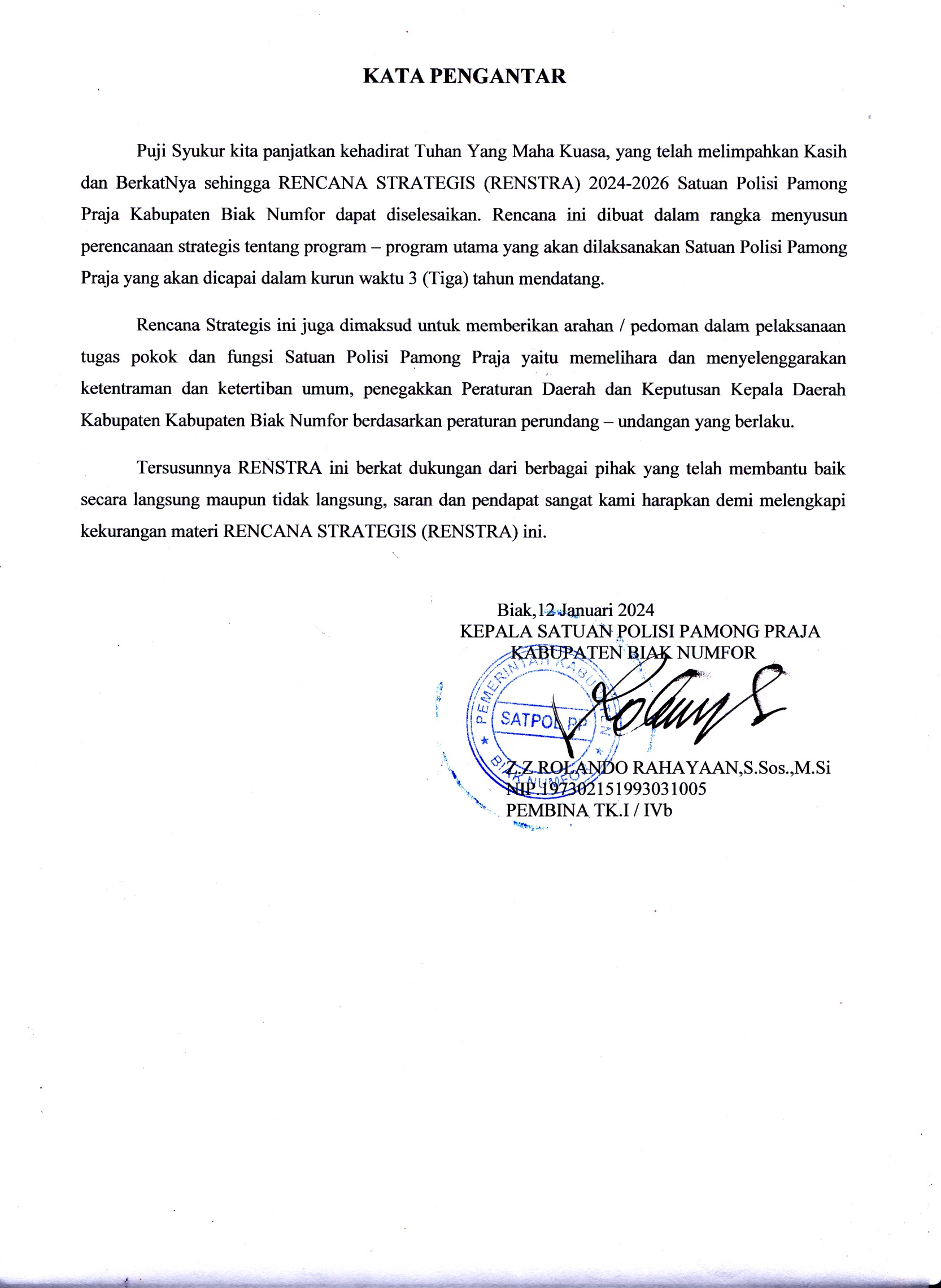
**2024-2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

# KABUPATEN BIAK NUMFOR

**Jln Woltermonginsidi – Biak Numfor- Papua Email:** [**satpolbiaknumfor**](mailto:satpolbiaknumfor)**@yahoo.com**

i



### DAFTAR ISI

*Halaman*

[KATA PENGANTAR ii](#_bookmark0)

[DAFTAR ISI iii](#_bookmark1)

[DAFTAR TABEL iv](#_bookmark2)

[DAFTAR LAMPIRAN v](#_bookmark3)

[BAB I 1](#_bookmark4)

[PENDAHULUAN](#_bookmark5) 1

* 1. [LATAR BELAKANG](#_bookmark6) 2
  2. [LANDASAN HUKUM 2](#_bookmark7)
  3. [MAKSUD DAN TUJUAN 2](#_bookmark8)
  4. [SISTEMATIKA PENULISAN 3](#_bookmark9)

[BAB II 4](#_bookmark10)

[GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4](#_bookmark11)

* 1. [TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 4](#_bookmark12)
  2. [SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR 1](#_bookmark13)9
     1. [SUMBER DAYA MANUSIA 1](#_bookmark14)9
     2. [SARANA DAN PRASARANA](#_bookmark16) 20
  3. [KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR.](#_bookmark18).21
  4. [TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI](#_bookmark21)

[PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR](#_bookmark21) .23

[BAB III 2](#_bookmark23)5

[PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2](#_bookmark24)5

* 1. [IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN](#_bookmark25) [SATUAN POLISI PAMONG PRAJA](#_bookmark25) 25
  2. [TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH](#_bookmark26) [TERPILIH 2](#_bookmark26)6
     1. [Visi 2](#_bookmark27)6
  3. [TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA 2](#_bookmark29)8

[BAB IV 2](#_bookmark30)9

[TUJUAN DAN SASARAN 2](#_bookmark31)9

* 1. [TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA](#_bookmark32) [KABUPATEN KABUPATENBIAK NUMFOR 2](#_bookmark32)9
     1. [Tujuan](#_bookmark33) 30
     2. [Sasaran Jangka Menengah](#_bookmark34) 30

[BAB V 3](#_bookmark36)1

[STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 30](#_bookmark37)

[BAB VI 3](#_bookmark39)3

[RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 3](#_bookmark40)3

* 1. [INDIKATOR KINERJA SKPD](#_bookmark42) 38
  2. [RENCANA PROGRAM 4](#_bookmark44)0
  3. [INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 4](#_bookmark46)1
  4. [KELOMPOK SASARAN 4](#_bookmark48)1
  5. [PENDANAAN INDIKATIF 4](#_bookmark49)1
  6. [FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA 4](#_bookmark50)4

[BAB VII](#_bookmark51) 46

[KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN](#_bookmark52) 46

* 1. [KINERJA DAN BIDANG URUSAN SKPD](#_bookmark53) 46
     1. [Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati](#_bookmark54) 46
     2. [Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat](#_bookmark55) 46
     3. [Urusan Pengembangan Kapasitas Aparartur](#_bookmark56) 47
     4. [Urusan Perlindungan Masyarakat](#_bookmark57) 48

[BAB VIII 5](#_bookmark59)0

[PENUTUP 5](#_bookmark60)0

[LAMPIRAN](#_bookmark61) 51

### DAFTAR TABEL

*Halaman* [Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten](#_bookmark15) Biak Numfor [Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat 1](#_bookmark15)9

[Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi](#_bookmark17) 20

[Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2024-2026](#_bookmark19) 21

[Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran](#_bookmark20) 22

[Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kab.Biak Numfor](#_bookmark22)24

[Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2](#_bookmark28)7

[Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten](#_bookmark35) [Kabupaten Biak Numfor](#_bookmark35) 30

[Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 3](#_bookmark38)2

[Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor 3](#_bookmark41)5

[Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah](#_bookmark43) 38

[Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD](#_bookmark47) 41

Tabel 6.7 Formulasi perhitungan indikator kinerja.………………………………………..44

[Tabel 7. 1 Data Anggota Linmas Dan Tps Se Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023](#_bookmark58) 49

### DAFTAR LAMPIRAN

*Halaman*

[LAMPIRAN 1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA](#_bookmark62) 52

[LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA](#_bookmark63) 54

[LAMPIRAN 3 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA](#_bookmark64) 57

[LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA](#_bookmark65) [TUJUAN SASARAN RPJMD](#_bookmark65) 59

[LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6](#_bookmark66)0

### BAB I PENDAHULUAN

#### LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi kepala daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan tahun 2026.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat dearah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor memuat visi misi Kabupaten Biak Numfor, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2026.Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Kabupaten Biak Numfor secara bertahap yang dimulai dari tahun pertama 2024 sampai dengan 2026.Strategi, arah kebijakan, skenario dan tahapan pembangunan dilingkup Satpol PP selanjutnya dirumuskan secara konprehensif, efektif dan efisien guna menjamin kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahun), sehingga dengan demikian Renstra Satpol PP Kabupaten Kabupaten Biak Numfor ini sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Kabupaten Biak Numfor.

#### LANDASAN HUKUM

* + 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan;
    2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    6. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Biak Numfor

#### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 adalah memberikan arah dan pedoman dalam penegakan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat selama 3 tahun kedepan.

Adapun tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 adalah untuk :

* + 1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 kedalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan;
    2. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Biak Numfor kedalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan operasional; dan
    3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.

#### SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Satpol PP Kabupaten Biak Numfor.

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

#### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

#### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

#### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan,

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor dan indikator kinerja SKPD.

#### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor.

#### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026.

**LAMPIRAN**

### BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR**

#### TUGAS FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

* + 1. Menegakan Perda dan Perkada;
    2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
    3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
5. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

#### Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

* + 1. Tugas Pokok

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dibidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

* + 1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan mempunyai fungsi :

* + - 1. Penetapan rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
      2. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamon Praja dengan instansi lainnya;
      3. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
      4. Pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
      5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
      6. Pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamonng Praja secara periodik; dan
      7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Sekretaris

* + 1. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatusahaan dan kerumahtanggaan satuan.

* + 1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Penyusunan program kerja Sekretariat;
      2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja Satuan:
      3. Pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
      4. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Satuan;
      5. Pelaksanaan urusan ketatusahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Satuan;
      6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Satuan;
      7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
      8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Subbagian Program

* + 1. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Program mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja Satuan.

* + 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
      2. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Satuan;
      3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
      4. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satuan;
      5. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
      6. Pengendalian dan pelaporan program kerja Satuan;
      7. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
      8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesusai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Subbagian Keuangan

* 1. Tugas Pokok

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dibidang mengumpul dan mengolah bahan pengelolaan administrasi keuangan Satuan

* 1. Fungsi

Dalam menylenggarakan tugas pokok, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
    2. Penyelenggaraan tata usaha keuangan Satuan;
    3. Penyusunan Neraca, laporan Keuangan dan Catatan Atas laporan Keuangan Satuan;
    4. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Satuan;
    5. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan; dan
    6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesusi dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

* 1. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

* 1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Subbagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian ;
    3. Penyelanggaraan ketatalaksanaan Satuan;
    4. Penyelanggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga

Kearsipan dan perpustakaan Satuan;

* + 1. Pengelolaan data/informasi/statistik yang berkaitan dengan satpol pp;
    2. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
    3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsnya.

#### Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah

* 1. Tugas

Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah mempunyai tugas membantu Kapala Satuan Polisi Pamong Praja dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pengawasan,penyelidikan dan penyidikan dan penindakan pelanggaran Perda.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penegak dan Peraturan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan program kerja di Bidang Penegak Perda;
    2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Penegakan Peraturan Daerah
    3. Penegakan peraturan daerah;
    4. Pelaksanaan fungsi penyedilikan dan pengawasan,pembinaan dan penyuluhan penegak perda;
    5. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Perda ;
    6. Pengeavaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Penegak dan Perda secara periodik;
    7. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan dan Perda secara periodik;dan
    8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

* 1. Tugas Pokok

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Perda dalam penegakan perundang-undangan daerah.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
    3. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan pelaksanaan perundang-undangan daerah;
    4. Fasilitasi dan pendampingan pengawasan pelaksanaan penegakan perundang- undangan daerah;
    5. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Perda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda

* 1. Tugas

Melaksanakan Penindakan dan Pelanggaran Perda sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Penyuluhan dan Pengawasan;
    3. Pelaksanaan Penindakan terhadap pelanggaran Perda ;
    4. Pelaksanaan Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
    5. Penyusunan bahan pengkoordinasian dengan unit/kerja instansi terkait;
    6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penyuluhan dan Pengawasan;
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Perda sesuai dengan tugas dan fungsinya

**8.Kepala Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda**

1. Tugas

Kepala Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda mempunyai tugas membantu Bidang Penegakan dan Perda dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Penindakan dan Pelanggaran Perda .

1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda dan ;
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Penindakan dan Pelanggaran Perda;
3. Pelaksanaan Penyuluan Perda ;
4. Pelaksanaan Penindakan dan Pelanggaran Perda masyarakat;
5. Pelaksanaan pengawasan Perda dan ;
6. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan;
7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penindakan dan Pelanggaran Perda;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan dan Perda sesuai denga tugas dan fungsinya.

#### Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

* 1. Tugas

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
    2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Perlindungan Masyarakat;
    3. Pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
    4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang perlindungan

masyarakat;

* + 1. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik;
    2. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat secara periodik; dan
    3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

* 1. Tugas

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan masyarakat;
    3. Penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
    4. Pemberdayaan, pengendalian dan pengerahan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat terhadap pelaksanaan keamanan lingkungan, bantuan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, bantuan pengamanan kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan pengamanan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
    5. Penyusunan rencana dan peningkatan kapasitas kelembagaan satuan perlindungan masyarakat;
    6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Pendataan dan Informasi

* 1. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan informasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis.
2. Menyusun rencana,program dan kegiatan seksi data dan informasi berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Mengimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
4. Menghimpun,Menganalisa dan Menyiapkan Kebijakan yang berkaitan dengan Data dan Informasi Guna
5. Melakukan Perbaikan terhadap data dan informasi agar dapat meningkatkan perkembangan tidak ketinggalan informasi dalam menyusun program kerja yang baik.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku

#### Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat

* 1. Tugas

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Bidang Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
    3. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan optimalisasi potensi masyarakat terkait dengan aspek perlindungan masyarakat;
    4. Pelaksanaan penyuluhan di bidang perlindungan masyarakat:
    5. Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
    6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
    7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

a.Tugas

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan

b.Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur
2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
3. Pelaksanaan diklat dasar dan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat;
5. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
6. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Peningkatan Kapasitas Personil;
7. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Kapasitas Personil secara perodik, dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan

* 1. Tugas

Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Personil melaksanakan fungsi sebagai berikut :

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
    2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personil Satuan Polisi Pamong Praja;
    3. Penyiapan bahan kerjasama dengan Satuan organisasi lain dalam pembinaan anggota Polisi Pamong Praja;
    4. Pelaksanaan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
    5. Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja;
    6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan

Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja; dan

* + 1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Personil sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas

* 1. Tugas

Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas sesuai dengan pedoman dn ketentuan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Kapasitas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas agar pelaksanaan program lebih terarah;
    3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berlaku
    4. Menyusun rumusan dan kebijakan fasilitas dan evaluasi serta koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas;
    5. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Personil Perlindungan Masyarakat;dan
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Kepala Seksi Teknis Fungsional

* 1. Tugas

Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang teknis fungsional sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Seksi Teknis Fungsional melaksanakan fungsi sebagai berikut :

* + 1. Penyusunan rencana kegiatan Seksi pelayanan teknis fungsional;
    2. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kapasitas agar pelaksanaan program lebih terarah;
    3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan yang berlaku
    4. Menyusun rumusan dan kebijakan fasilitas dan evaluasi serta koordinasi pelaksaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
    5. Merumuskan sasaran Program kerja satuan polisi pamong praja dan penyidik Pegawai negeri Sipil dan penegakkan peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran;dan
    6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. **Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat**
   1. Tugas

Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan Operasional dan Pengendalian,Pembinaan dan Penindakan Internal dan Kerja sama

b.Fungsi

Untuk Melaksanakan Tugas Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
2. Penghimpunan Peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat
3. Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah.
4. Pelaksanaan Kerjasama terkait Bidang Tugas Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat dengan intern dan unit kerja
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait
6. Penyusunan dan Penyampaian Laporan pelaksanaan Tugas
7. **Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian**
   1. Tugas

Melaksanakan tugas Operasional dan Pengendalian berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Seksi Operasional dan Pengendalian melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Peraturan Perundang – Undangan ,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelayanan Operasional dan Pengendalian.
2. Menyusun rencana,program dan kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan aturan yang berlaku
3. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas
4. Melaksanakan tugas kegiatan Operasional dan Pengendalian sesuai ketentuan yang berlaku
5. Melakukan Kegiatan Khusus seperti penertiban tempat prostitusi,gelandangan,pengemis,waria,perjudian,minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
6. Melakukan Penertiban terhadap lampu penerangan,reklame,pemakaian saran umum dan tempat usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan Prosedur Pelayanan Pengamanan Kepala Daerah dan Tamu Daerah serta melakukan pengawalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyiapkan Bahan Kordinasi dengan unit kerja instasi terkait.
9. **Kepala Seksi Pembinaan dan Penindakan Internal**
   1. Tugas

Melaksanakan tugas melaksanakan pembinaan dan penindakan Internal berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Seksi Pembinaan dan Penindakan Internal melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Peraturan Perundang – Undangan ,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Pembinaan dan Penindakan Internal.
2. Menyusun rencana,program dan kegiatan Seksi Pembinaan dan Penindakan Internal berdasarkan aturan yang berlaku.
3. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas
4. Melaksanakan tugas kegiatan Pembinaan dan Penindakan Internal sesuai ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan Pembinaan dan Penindakan Internal terkait Pembinaan interen Keanggotaan bidang tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan intern dan unit kerja/Instansi.
6. Menyusun Bahan Pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Pembinaan dan penindakan internal
8. **Kepala Seksi Kerjasama**
   1. Tugas

Melaksanakan tugas melaksanakan Kerjasama berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku

* 1. Fungsi

Untuk melaksanakan Tugas Seksi Kerjasama melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Peraturan Perundang – Undangan ,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Pelayanan Kerjasama.
2. Menyusun rencana,program dan kegiatan Seksi Kerjasama berdasarkan aturan yang berlaku
3. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas
4. Melaksanakan tugas kegiatan Kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku
5. Melaksanakan Kerjasama terkait bidang tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan intern dan unit kerja/instansi
6. Menyusun Bahan Pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi Kerjasama

#### Kelompok Jabatan Fungsional

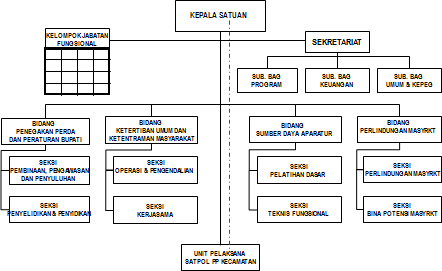
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor telah di bentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindak lanjuti melalui Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat
3. Bidang Penegak Perda
4. Bidang Perlindungan Masyarakat
5. Bidang Sumber Daya Aparatur
6. Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT);dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

#### Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor (Perbub Nomor 32 Tahun 2017)**



#### SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KABUPATEN BIAK NUMFOR

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kabupaten Biak Numfor kemungkinan tidak akan terwujud apabilaperubahan mendasar dibidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kabupaten Biak Numfor dapat terhindarkan.

#### SUMBER DAYA MANUSIA

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor menurut kualifikasi golongan/pangkat.

#### Tabel 2. 1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Menurut Kualifikasi Golongan/Pangkat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pangkat/Gol.Ruang** | **Jumlah** |
| *1* | *2* | *9* |
| 1 | Juru Muda (Ia) |  |
|  | Juru Muda Tingkat I (Ib) |  |
|  | Juru (Ic) | 1 |
|  | Juru Tingkat I (Id) | 1 |
| 2 | Pengatur Muda (IIa) | 2 |
|  | Pengatur Muda Tingkat I (IIb) | 14 |
|  | Pengatur (IIc) | 1 |
|  | Pengatur Tingkat I (IId) |  |
| 3 | Penata Muda (IIIa) | 1 |
|  | Penata Muda Tingkat I (IIIb) | 1 |
|  | Penata (IIIc) | 5 |
|  | Penata Tingkat I (IIId) | 4 |
| 4 | Pembina (IVa) |  |
|  | Pembina Tingkat I (IVb) | 1 |
|  | Pembina Utama Muda (IVc) |  |
|  | Pembina Utama Madya (IVd) |  |
|  | Pembina Utama (IVe) |  |
| 5 | Non PNS | 200 |
|  | JUMLAH | 231 |

*Sumber : Daftar Nominatif Satpol PP Desember 2023*

#### SARANA DAN PRASARANA

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

#### Tabel 2. 2 Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun Pembelian | Nama Barang | Kondisi | Jumlah |
| 2015 | Kendaraan Roda 6 | Baik | 2 Unit |
| 2015 | Kendaraan Roda 4 | Baik | 3 Unit |
| 2013 | Kendaraan Roda 2 | Baik | 2 Unit |
| 2015 | Kendaraan Roda 2 | Baik | 6 Unit |
| 2017 | Angkutan Laut (Speed Boat) | Baik | 1 Unit |
| 2013 | Tameng / Perisai | Baik | 30 Unit |
| 2007 | Rak Kayu | Rusak Berat | - |
| 2015 | Lemari Kayu | Rusak Berat | - |
| 2015 | Lemari Kayu | Rusak Berat | - |
| 2007 | Kursi Biasa | Rusak Berat | - |
| 2009 | Meja kerja | Rusak | 5 Unit |
| 2015 | Meja kerja | Rusak Berat | 5 Unit |
| 2009 | Sofa | Rusak Berat | 2 Unit |
| 2009 | Meubelair | Rusak Berat | 1 Unit |
| 2015 | Antena | Rusak Berat | 2 Unit |
| 2019 | Lemari Arsip 2 Susun 4 Pintu 2 bh | Rusak Berat | 2 Lemari |
| 2019 | Lemari Arsip Pintu Kaca 3 bh | Rusak Berat | 3 Lemari |
| 2019 | Filling Kabinet 3 bh | Rusak Berat | 3 Buah |
| 2019 | White Board Gantung | Rusak Berat | 1 |
| 2019 | AC Split 1 PK 4 bh | Rusak Berat | 4 Unit |
| 2019 | Notebook Aser 1 bh | Rusak Berat | 1 Unit |
| 2019 | Printer Canon MP 258 5 bh | Rusak Berat | 5 Unit |
| 2019 | Meja Kerja 1 biro 6 bh | Rusak Berat | 6 meja |
| 2019 | Meja Kerja 1/2 biro 7 bh | Rusak Berat | 7 meja |
| 2019 | Meja Rapat Standar 1 biro full size 6 bh | Rusak Berat | 1 meja |
| 2019 | Kursi Kerja Futura 45 bh | Rusak Berat | 45 kursi |
| 2019 | Sofa Lux | Rusak Berat | 1 |
| 2019 | Dispenser Standar Tinggi + Pendingin 1 bh | Rusak Berat | 1 unit |
| 2019 | Kulkas 1 pintu 3 bh | Rusak Berat | 3 unit |
| 2019 | Jam dinding 4 bh | Rusak Berat | 4 |
| 2019 | Pengadan Faximili | Rusak Berat | 1 Unit |
| 2015 | Handy Talky ( HT ) | Rusak Berat | - |
| 2016 | Handy Talky ( HT ) | Rusak Berat | - |
| 2016 | Repeater | Rusak Berat | 4 |

*Sumber: Buku Inventaris Barang 2023*

#### KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan tugas adalah sebagai berikut :

#### Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Renstra Periode 2019-2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Hasil Th.2019** | **Hasil Th.2020** | **Hasil Th.2021** | **Hasil Th.2022** | **Hasil**  **Th.2023** | **Target 2024** | **Satuan** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Cakupan Pelayanan  Administrasi Perkantoran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| 2 | Angka kriminalitas yang tertangani | 5 | 10 | 25 | 35 | 31 | 31 | % |
| 3 | Tingkat penyelesaian  pelanggaran K3 | 20 | 30 | 35 | 40 | 31 | 31 | % |
|  | (ketertiban, ketentraman,  keindahan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jumlah gangguan  KANTRANTIBMAS | 15 | 8 | 7 | 4 | 13 | 13 | Kasus |
| 5 | Jumlah demonstrasi yang  ditujukan kepada | - | - | - | - | - | - | Kasus |
| 6 | Angka kriminalitas | 8 | 10 | 4 | 2 | - | 8 | Kasus |

Sedangkan capaian kinerja anggaran dengan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

#### Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Anggaran Dengan Realisasi Anggaran

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Anggaran (%)** | | | | | **Ket.** |
| **Thn. 2019** | **Thn. 2020** | **Thn. 2021** | **Thn. 2022** | **Thn. 2023** |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* |  |  | *10* |
|  |  | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 99,23 | 99,83 | 99,12 | 99,12 | 99,12 |  |
|  |  | 99 | 99,97 | 94,86 | - | - |  |
|  |  | 100 | - | 99,97 | - | - |  |
|  |  | 100 | 99,41 | 82,30 | - | - |  |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 100 | 30,00 | 20,00 |  |
|  |  | Angka kriminalitas yang tertangani Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | - | - | 100 | 30,00 | 20,00 |  |
|  |  | 1. Jumlah gangguan KANTRANTIBMAS 2. Jumlah demonstrasi yang ditujukan kepada Angka kriminalitas | 100 | 100 | 100 | 30,00 | 20,00 |  |

#### TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Berdasarkan fakta diatas, Kabupaten Biak Numfor merupakan wilayah yang aman dan kondusif dengan tingkat kriminalitas rendah sehingga kondisi yang aman dan kondusif tersebut harus tetap dijaga dan dipertahankan agar visi dan misi kepala daerah terpilih dapat dilaksanakan dengan optimal sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Tantangan eksternal yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga kondisi wilayah aman dan kondusif tergambar dalam analisis SWOT yang berhasil diidentifikasi adalah:

#### Strength Factors

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yang meliputi :

* 1. Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  2. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yang cukup memadai; dan
  3. Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### Weakness Factors

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yang meliputi:

* 1. Minimnya dukungan dari stakholder;
  2. Produk Hukum daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan; dan
  3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku.

#### Oppurtunities Factors

Merupakan kondisi peluang berkembang dimasa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor, kebijakan pemerintah kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi :

* 1. Dinamika perkembangan produk hukum daerah;
  2. Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kondisi aman, tertib dan tentram; dan
  3. Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan.

#### Threats Factors

Merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi ancaman tersebut akan menjadi penghalang baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang, yang meliputi :

* 1. Munculnya isu radikalisme dan SARA;
  2. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat; dan
  3. Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional

**Tabel 2. 5 Kerangka Kerja Analisis SWOT Satuan Polisi Pamong Praja**

**Kabupaten Biak Numfor**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kekuatan (Strength)** | **Kelemahan (Weaknesses)** |
| Adanya dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | Minimnya dukungan dari stakholder; |
| Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor yang cukup memadai. | Produk Hukum daerah yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial kemasyarakatan |
| Adanya pengaturan jadwal dan atau pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. | Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| **Peluang (Opportunities)** | **Ancaman (Threats)** |
| Dinamika perkembangan produk hukum daerah | Munculnya isu radikalisme dan SARA |
| Adanya tuntutan kebutuhan masyarakat untuk kondisi aman, tertib dan tentram | Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat |
| Keharmonisan sosial budaya kemasyarakatan | Terbukanya akses dari luar negeri maupun regional |

### BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kabupaten Biak Numfor tahun mendatang.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daearah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaran roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatanya dengan aman.

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan dengan pendekatan premtif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada upaya pembinaan secara konprehensif dan kontinyu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Pendekatan yang dilaksanakan meliputi:

* + 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sehingga terjadi benturan kepentingan politik, sosial, budaya dan ekonomi ditengah masyarakat;
    2. Pembinaan atau sosialisasi sebagai bentuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    3. Koordinasi terpadu dengan stakholder dalam bentuk pengawasan maupun penindakan terhadap munculnya gejala yang timbul dalam masyarakat.

#### TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

#### Visi

Visi adalah suatu gambaran, pemikiran atau tujuan dimasa depan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Memperhatikan isu – isu strategis dan tantangan kedepan masyarakat Kabupaten Biak Numfor maka Visi Kabupaten Kabupaten Biak Numfor adalah :

**” MEWUJUDKAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN “**.

Visi tersebut menggambarkan harapan keinginan/mewujudkan masyarakat yang lebih berkarakter berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian dengan penjelasan sebagai berikut :

* + - 1. Kabupaten Biak Numfor yang Berkarakter, mengandung arti suatu kondisi keadaan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan batin terpenuhi dengan didukung oleh karakter yang baik;
      2. Kabupaten Biak Numfor yang Berdaya Saing, mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; dan
      3. Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai , taat dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

#### Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi Kabupaten Kabupaten Biak Numfor 2024-2026 yaitu :

“Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi”

Misi ini bertujuan Terselenggaranya pemerintahanyang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukungsumber daya aparatur yang profesional.

Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas,antisipatif dan akuntabilitas.

#### Tabel 3. 1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi : | **MEWUJUDKAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN** | |
| Misi 1 : | Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi | |
| Tujuan: | 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketenteraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif | |
| Sasaran: | 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP 2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor 3. Menciptakan Stabilitas Pengawasan Pelanggaran Perda | |
| Indikator Kinerja dalam  RPJMD : | 1.  2.  3.  4. | Rasio personil SatpoL PP per 10.000 jumlah penduduk  Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Biak Numfor  Presentase Penegakan Perda  Lokasi Bebas Pedagang Kaki Lima |
| Program | 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

#### TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Papua dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Visi yaitu “**MEWUJUDKAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN**” yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor dalam bentuk kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Operasi Yustisi dan Non Yustisi, Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat

#### PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Kerawanan-kerawanan nasional menunjukkan adanya rangkaian gangguan keamanan antara lain dalam bentuk pertentangan-pertentangan politik, demonstrasi-demontrasi anarkis merupakan isu-isu nasional yang harus disikapi melalui upaya-upaya menangkal segala bentuk pengaruh-pengaruh yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Isu-isu strategis yang perlu dicermati untuk dijadikan penentuan langkah-langkah strategis dalam penangananya antara lain:

* + 1. Isu Primordialisme, Ras dan Keagamaan;
    2. Kebijakan pemerintah pusat yang menggangu atau menghambat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya seperti penetapan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berakibat masyarakat dikawasan hutan lindung tersebut tidak dapat mengolah dan mengelola hasil hutan;
    3. Kestabilan suhu politik yang tidak menentu menyebabkan terhambatnya para investor untuk membuka usaha bisnis di Kabupaten Biak Numfor;

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR

#### Tujuan

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut :

* + - 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
      2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif.

#### Sasaran Jangka Menengah

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

* + - 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP;
      2. Meningkatnya Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor;

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasari pada faktor-faktor kunci keberhasilan (CSF) organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi Kabupaten Kabupaten Biak Numfor, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN** | | |
|  |  |  |  | **2024** | **2025** | **2026** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik |  | Predikat SAKIP | B | B | BB |
| Meningkatnya Penyelenggaraan  Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Predikat SAKIP | B | B | BB |
| 2 | Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif |  | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3  (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | Persentase Penegakan Perda dan  Peraturan Kepala Daerah | 10% | 20% | 50% |
| Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman  dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% |

### BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 :

1. Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur;
2. Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat;
3. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan satuan polisi pamong praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur;
3. Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
4. Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
5. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlimas dalam Menjaga Kondisi Wilayah yang Aman dan Kondusif.

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISI :** | **MEWUJUDKAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN** | | | | | | |
| **MISI**  **I :** | **Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi Birokrasi** | | | | | | |
| **TUJUAN** | | **SASARAN** | | **STRATEGI** | | **ARAH KEBIJAKAN** | |
| 1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik | 1 | Meningkatnya Penyelenggaraa n Akuntabilitas Kinerja Satpol  PP | 1 | Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur | 1 | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja |
| 2 | Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur |
| 2 | Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan  Kondusif | 1 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten  Biak Numfor | 1 | Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada  Masyarakat | 1 | Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat |
|  | |  |  |  | 2 | Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 | Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah |
| 3 | Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlinmas dalam Menjaga Kondisi Wilayah  yang Aman dan Kondusif |

### BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program dan kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat dimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

#### PROGRAM DAN KEGIATAN

Berikut ini program proritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026:

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

* + - 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah

1.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### Tabel 6. 1 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tujuan** | **Sasaran** |  |  | | **Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)** | **Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan** | **Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | | | | **Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung** |  |
| **Kode** |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | **Kondisi Kinerja pada** | |  |
| **Program dan Kegiatan** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **akhir periode Renstra Perangkat Daerah** | | **Lokasi** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** | **Target** | **Rp.** |  |  |
| *1* | *2* | ***3*** | *4* | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dan Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif |  |  |  |  | **Predikat SAKIP** |  | B |  | B |  | B |  | BB |  |  |  |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor |  |  |  | **Predikat SAKIP** |  | B |  | B |  | B |  | BB |  |  |  |
|
|  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahab Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran** |  | **95%** | **7.420.637.674** | **95%** | **7.420.637.674** | **95%** | **7.420.637.674** | **100%** | **0** | Satpol PP | Biak Numfor |
| **01** |  |
|  |
| **2,06** |  | **Administrasi Umum dan Perangkat Daerah** |  |  |  | **101.896.638.000** |  | **101.896.638.000** |  | **101.896.638.000** |  | **0** | **Satpol PP** | **Biak Numfor** |
|  | 0001 | Penyediaan Komponene instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |  | 1 tahun | 1.996.400 | 1 tahun | 1.996.400 | 1 tahun | 1.996.400 | 1 tahun |  |  | Biak Numfor |
|  | 0002 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor |  | 12 Bulan | 79.945.000 | 12 Bulan | 79.945.000 | 12 Bulan | 79.945.000 | 12 Bulan |  |  | Biak Numfor |
|  | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terlaksananya Jasa Administrasi umum Perangkat Daerah |  | 1 paket | 79.945.600 | 1 paket | 79.945.600 | 1 paket | 79.945.600 | 1 paket |  |  | Biak Numfor |
|  | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan | Terlaksananya Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 1 tahun | 15.384.638 | 1 tahun | 15.384.638 | 1 tahun | 15.384.638 | 1 tahun |  |  | Biak Numfor |
|  | 0009 | Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsultasi skpd |  | 1 Dokumen | 4.570.000 | 1 Dokumen | 4.570.000 | 1 Dokumen | 4.570.000 | 1 Dokumen |  |  | Biak Numfor |
| **2,02** |  | **Adminisstrasi Keuangan Perangkat Daerah** |  |  |  | **2.268.080.136** |  | **2.268.080.136** |  | **2.268.080.136** |  | **0** |  | **Biak Numfor** |
|  | 0001 | Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN | Terlaksananya gaji dan tunjangan asn |  | 31 Orang | 2.268.080.136 | 31 Orang | 2.268.080.136 | 31 Orang | 2.268.080.136 | 31 Orang |  |  | Biak Numfor |
| **2,08** |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  | **4.862.956.200** | **95%** | **4.862.956.200** | **95%** | **4.862.956.200** | **95%** | **0** | **Satpol PP** | **Biak Numfor** |
|  | 0002 | Penyediaan Jasa komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah |  | 1 Tahun | 14.862.969.200 | 1 Tahun | 14.862.969.200 | 1 Tahun | 14.862.969.200 | 1 Tahun | 0 |  | Biak Numfor |
|  | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah |  | 203 orang | 4.862.956.200 | 203 orang | 4.862.956.200 | 203 orang | 4.862.956.200 | 203 orang | 0 | Satpol PP | Biak Numfor |
| **2,05** |  | **Administrasi Kepegawaian Daerah** |  |  |  | **49.402.600** | **353** | **49.402.600** | **353** | **49.402.600** | **353** | **0** |  | **Biak Numfor** |
|  | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Berseta Atribut kelengkapannya | Terlaksananya pengadaan pakaian dinas berserta atribut dan pelengkapannya |  | 203 0rang | 49.402.600 | 203 0rang | 49.402.600 | 203 0rang | 49.402.600 | 203 0rang | 0 | Satpol PP | Biak Numfor |
| **2,01** |  | **Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** |  |  |  | **11.308.300** | **118** | **11.308.300** | **118** | **11.308.300** | **118** | **0** |  | **Biak Numfor** |
|  | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah | terlaksananya Koordinasi dan laporan kinerja perangkat daerah |  | 1 tahun | 11.308.300 | 1 tahun | 11.308.300 | 1 tahun | 11.308.300 | 100% | 0 | Satpol PP | Biak Numfor |
| **2,09** |  | **Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah** |  |  |  | **126.994.800.** |  | **126.994.800.** |  | **126.994.800.** |  | **0** | **Satpol PP** | **Biak Numfor** |
|  | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | terlaksananya Jasa pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 12 Bulan | 27.000.000 | 12 Bulan | 27.000.000 | 12 Bulan | 27.000.000 | 100% | 0 |  | Biak Numfor |
| **2,07** |  | **Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah d aerah** |  |  |  | **99.994.800** |  | **99.994.800** |  | **99.994.800** |  | **0** | **Satpol PP** | **Biak Numfor** |
|  | 0005 | Pengadaan Mebel | terlaksananya pengadaan mebel Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 12 Bulan | 99.994.000 | 12 Bulan | 99.994.000 | 12 Bulan | 99.994.000 | 100% | 0 |  | Biak Numfor |
|  |  |  |  | **TOTAL** |  |  |  | **7.420.637.674** |  | **7.420.637.674** |  | **7.420.637.674** |  | **0** |  |  |

#### INDIKATOR KINERJA SKPD

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor pada periode 3 (tiga) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selaku Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

Indikator-indikator Kinerja yang telah ditetapkan telah disesuaikan pula dengan target- target capaian yang akan dicapai setiap tahunnya sampai dengan 3 (Tiga) tahun mendatang. Adapun indikator kinerja dan target capaiannya dapat terlihat di tabel 6.2

#### Tabel 6. 2 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN/SASARAN** | **TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik |  | Predikat SAKIP | B | B | B |
| Meningkatnya Penyelenggaraan  Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Predikat SAKIP | B | B | B |
| 2 | Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif |  | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3  (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan  Kepala Daerah | 10% | 10% | 20% |
| Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman  dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% |

#### RENCANA PROGRAM

#### Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

* + - 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah

1.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Dari indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024- 2026 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai pada setiap tahunnya sampai dengan 3 (Tiga) tahun ke depan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai berikut:

#### Tabel 6. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | **INDIKATOR UTAMA** | **ALASAN** | | **SUMBER DATA** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | | *5* |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Predikat SAKIP | 1 | Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas  kinerja, di lingkungan Satpol PP (SAKIP) | Renstra, Renja dan Lakip |
| 2 | Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi  Pemerintah |
| 3 | Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi  guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara |
| 2 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | Persentase Penegakan  Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 1 | Menjaga kondusifitas ketenteraman dan ketertiban agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya | Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional |
| Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,  Ketentraman dan Keindahan) |

#### KELOMPOK SASARAN

* + 1. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor;
    2. Daerah atau Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum;
    3. Pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
    4. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

#### PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yaitu masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang harmonis, aman, tertib dan tentram maka dapat diindikasikan pendanaan selama 3 (tiga) tahun kedepan secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2026 seperti berikut ini :

##### Tahap Pertama :

Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2024 adalah tahap pertama pelaksanaan Renstra, diusulkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 7.420.637.674,- dipergunakan untuk pembiayaan program sebagai berikut :

* + - 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah

1.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

##### Tahap Kedua :

Pada tahun 2025 tahap kedua pelaksanaan Renstra diusulkan dana APBD Kabupaten Kabupaten Biak Numfor sebesar Rp. 7.420.637.674,- yang diperuntukkan pembiayaan Program sebagai berikut :

* + - 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah

1.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

##### Tahap ketiga :

Pada tahun 2026 tahap ketiga pelaksanaan Renstra menurut rencana diusulan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Biak Numfor Sebesar Rp. 7.420.637.674,- untuk membiayai program sebagai berikut:

* + - 1. Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah

1.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

1.4 Administrasi umum perangkat daerah

1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Pengadaan Mebel

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan listrik

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

#### FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

**FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, SASARAN & PROGRAM) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BIAK NUMFOR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Nama** | **Indikator** | **Formulasi/ Perhitungan/ Rumus** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Tujuan 1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja  Pelayanan Publik | Predikat SAKIP | (diisi oleh bag organisasi & Inspektorat) |
| 2 | Tujuan 2 | Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada  Kondisi yang Aman dan Kondusif | Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,  Ketentraman dan Keindahan) | - |
| 3 | Sasaran 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | Predikat SAKIP | (diisi oleh bag organisasi & Inspektorat) |
| 4 | sasaran 2 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numor | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di bagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah keseluruhan di Kali 100 |
| Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan  Keindahan) | Jumlah Pelanggaran K3 yang Terselesaikan dibagi Jumlah Pelanggaran K3 keseluruhan di Kali 100 |
| 5 | Program 1 | Administrasi umum dan perangkat daerah | Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | Jumlah kegiatan yang terealisasi 100% dibagi jumlah kegiatan dikali 100 |
|  |  | Administrasi keuangan daerah perangkat daerah | Cakupan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah gaji dan tunjangan asn 31 orang selama 1 tahun |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Daerah | Cakupan keseragaman pakaian dinas beserta  kelengkapannya | jumlah 203 anggota yang disediakan pakaian dinas/ olahraga dan perlengkapannya dibagi jumlah anggota keseluruhan |
|  |  | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan listrik dan air  Cakupan Non PNS yang kompeten | Jumlah alokasi listrik dan air untuk kantor selama 1 tahun  Jumlah non pns 203 orang terbayar selama 1 tahun |
|  |  | Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | Cakupan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan evaluasi daerah | Jumlah penyampaian laporan tepat waktu di bagi jumlah laporan keseluruhan selama 1 tahun |
|  |  | Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Cakupan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan | jumlah kendaran dinas baik roda 2,4 dan roda 6 |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | Cakupan pengadaan mebel penunjang kerja | Jumlah mebel kantor disesuaikan dengan kebutuhan kantor/dinas |

### BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### KINERJA DAN BIDANG URUSAN SKPD

#### Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Biak Numfor berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengingat keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

#### Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

#### Kewenangan Pol PP :

* + - * 1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
        2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
        3. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga mayarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

#### Kewajiban Pol PP :

* + - * 1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma- norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat’
        2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
        3. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan;
        4. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum serta pengawasan aset-aset daerah;
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Biak Numfor

#### Urusan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kabupaten Biak Numfor yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Biak Numfor berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Biak Numfor tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar.Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Pengembangan Kapasitas apapratur juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaan jasmani, pelatihan DALMAS, serta pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan ke pusat pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja.

#### Urusan Perlindungan Masyarakat

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di jelaskan bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini mempunyai tugas, meliputi:

1. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
2. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
3. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
4. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman; dan
5. melakukan relokasi, rekonsiliasi dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Tabel 7. 1 Data Anggota Linmas Dan Tps Se Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **JUMLAH DESA** | **JUMLAH TPS** | **JUMLAH POS KAMLING** | **JUMLAH LINMAS** | |
| **DESA** | **TPS** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Distrik Biak Kota | 16 | 70 | - | 16 | 70 |
| 2. | Distrik Samofa | 11 | 38 | - | 11 | 38 |
| 3. | Distrik yendidori | 19 | 22 | - | 19 | 22 |
| 4. | Distrik Biak Timur | 9 | 26 | - | 9 | 26 |
| 5. | Distrik Warsa | 20 | 19 | - | 20 | 19 |
| 6. | Distrik Biak Barat | 21 | 21 | - | 21 | 21 |
| 7. | Distrik Biak Utara | 16 | 16 | - | 16 | 16 |
| 8. | Distrik Oridek | 14 | 14 | - | 14 | 14 |
| 9. | Distrik Andey | 12 | 8 | - | 12 | 8 |
| 10. | Distrik Bondifuar | 5 | 22 | - | 5 | 22 |
| 11. | Distrik Padaido | 11 | 11 | - | 11 | 11 |
| 12. | Distrik Aimando | 13 | 13 | - | 13 | 13 |
| 13. | Distrik Yawosi | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
| 14. | Distrik Numfor Barat | 12 | 12 | - | 12 | 12 |
| 15. | Distrik Numfor Timur | 9 | 9 | - | 9 | 9 |
| 16. | Distrik Poiru | 9 | 9 | - | 9 | 9 |
| 17. | Distrik Orkeri | 9 | 9 | - | 9 | 9 |
| 18. | Distrik Swandiwe | 16 | 16 | - | 16 | 16 |
| 19. | Distrik Bruyadori | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
| **TOTAL** | | **240** | **353** | **-** | **240** | **240** |

*Sumber: data Satpol PP kabupaten Biak Numfor 2023*

Pada tabel 7 tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah tenaga Linmas di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2023 adalah 240 Linmas dengan jumlah TPS 240.

### D:\LKIP 2023\2024_01_15buka tutup renstra\pengantar buka dan tutup 2024_renstra.jpg



**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1 RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## RENCANA STRATEGIS SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2024 - 2026

#### V I S I : MEWUJUDKAN BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU

#### PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN

**M I S I 1. MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA,BERSIH DAN PROFESIONAL YANG**

**BERORIENTASI KEPADA PELAYANAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Tujuan*** | | | | ***Sasaran*** | | | | | ***Stategi mencapai Tujuan dan Sasaran*** | | | | ***Sek/Bidang/Bagian Pelaksana*** | | | |
| ***Uraian*** | | ***Indikator Kinerja*** | | ***Uraian*** | | ***Indikator Kinerja*** | | | ***Kebijakan*** | | ***Program*** | |
| 1.1 | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik | 1. | Predikat SAKIP | 1.1.1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP |  | 1. | Predikat SAKIP | 1.1.1.1 | Peningkatan Akuntabilitas  Kinerja | 1 | Administrasi umum dan perangkat daerah | | |  | Sekretariat |
|  |  | 2 | Administrasi keuangan daerah perangkat daerah | | |  | Sekretariat |
|  |  |  |  | 3 | Administrasi Kepegawaian Daerah | | |  | Sekretariat |
|  | 4 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | |  | Sekretariat |
|  | 5 | Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah | | |  | Sekretariat |
|  | 6 | Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | Sekretariat | | |
|  | 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | | Sekretariat | | |
| 2.1 | Mantapnya  Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif | 1. | Persentase  Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 2.1.1 | Meningkatnya  Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | 1. | | Persentase  Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 2.1.1.1 | Peningkatan Kesadaran dan  Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat | 1 | Pemberdayaan Masyarakat untuk  Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Bidang Perlindungan  Masyarakat,Bidang Penegakan Perda,Bidang Trantibum | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  (Ketertiban, Ketentraman dan  Keindahan) | 2.1.1.2 | Peningkatan Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Bidang Penegakan Perda dan Bidang Trantibum |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3 | Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Anggota Satlinmas dalam Menjaga Kondisi Wilayah yang Aman dan Kondusif | 3 | Peningkatan Kapasitas LINMAS | Bidang Linmas & Bidang SDA |

**LAMPIRAN 2 INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

# Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD

# Satuan Polisi Pamong Praja

### TAHUN 2024 - 2026

#### V I S I : MEWUJUDKAN BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN

#### M I S I I : MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK DAN BERSIH

**TUJUAN 1** : **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Tujuan | Satuan | Target Kinerja | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Predikat SAKIP | Nilai | B | B | BB |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Sasaran*** | | | | Satuan |  | | | | | ***Sek/Bidang/Bagian Pelaksana*** | |
|  | **Uraian** |  | **Indikator Kinerja** | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | 1. | Predikat SAKIP | Nilai | B | B | BB |  |  | 1. | Sekretariat |

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

# Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja

### TAHUN 2024 - 2026

#### V I S I : MEWUJUDKAN BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI

#### SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN

**M I S I II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA**

**TUJUAN 2 : Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | No | Indikator Tujuan | Satuan | Target Kinerja | | | | |  | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 2. | Persentase Penyelesaian  Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | % | 50% | 65% | 75% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Sasaran*** | | | | Satuan |  | | | | | ***Sek/Bidang/Bagian Pelaksana*** | | |
|  | **Uraian** |  | **Indikator Kinerja** | 2024 | 2025 | 2026 |  | |  |  | |
| 1 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | 1. | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | % | 10% | 20% | 50% |  | |  | 1. | Bidang Penegakan Perda dan Bidang Trantibum |
| 2. | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | % | 100% | 100% | 100% |  | |  |

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

# Indikator Kinerja Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja

### TAHUN 2024 - 2026

#### V I S I : MEWUJUDKAN BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS BERKARAKTER DAN BERBUDAYA SEBAGAI

#### SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN DAN

**M I S I II : MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS YNG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG**

#### TUJUAN 2 : Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | No | Indikator Tujuan | Satuan | Target Kinerja | | | | |  | |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 2. | Persentase Penyelesaian  Pelanggaran K3 (Ketertiban,  Ketentraman dan Keindahan) | % | 100% | 100% | 100% |  |  |
| ***Sasaran*** | | | | Satuan |  | | | | | ***Sek/Bidang/Bagian Pelaksana*** | |
|  | **Uraian** |  | **Indikator Kinerja** | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | 1. | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan  Kepala Daerah | % | 10% | 20% | 50% |  |  | 1. | Bidang Penegakan Perda dan Bidang Trantibum |
| 2. | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  (Ketertiban,Ketentraman danKeindahan) | % | 100% | 100% | 100% |  |  |

**LAMPIRAN 3 MATRIKS PAGU INDIKATIF RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

# PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

## Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi dan Pamong Praja Tahun 2024 - 2026

#### V I S I : MEWUJUDKAN BIAK NUMFOR YANG RELIGIUS BERKARAKTER DAN BERBUDAYA

#### SEBAGAI SUMBU PERTUMBUHAN YANG BERDAYA SAING MENUJU KESEJAHTERAAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M I S I :** | | | **1.** | **MEMPERKUAT TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BERWIBAWA,BERSIH DAN**  **PROFESIONAL YANG BERORIENTASI KEPADA PELAYANAN** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **2.** | **MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN STRATEGIS**  **YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN TATA RUANG** | | | | | | | | | | | | |
| **TUJUAN :** | | | **1.** | **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **2.** | **Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif** | | | | | | | | | | | | |
| **Sasaran** | | | | | | | **Program/Kegiatan** | | **Tahun** | | | | | | | **Sek/Bidang/Bagian Pelaksana** | |
| **Uraian** | | | **Indikator Kinerja** | | | | **2024** | | **2025** | | **2026** |  |  |  | |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP | | 1.1 | Predikat SAKIP | | | 1 | Administrasi umum dan perangkat daerah |  | 101.836.638.000 | 101.836.638.000 | | 101.836.638.000 |  |  | Sekretariat | |
| 2 | Administrasi keuangan daerah | 2.268.080.136 | | 2.268.080.136 | | 2.268.080.136 |  |  |  | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Daerah | 49.402.600 | | 49.402.600 | | 49.402.600 |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  | |
| 4 | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 4.862.956.200 | | 4.862.956.200 | | 4.862.956.200 | Sekretariat | | |
| 5 | Perencanaan ,Penganggaran dan evaluasi perangkat daerah |  |  |  | | 11.308.300 | Sekretariat | | |
| 11.308.300 | 11.308.300 |  |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6 | Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 129.994.800 | 129.994.800 | 129.994.800 | Sekretariat |
|  |  |  |  | 8 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah | 99.994.000 | 99.994.000 | 99.994.000 |  |
|  |  |  |  | 1 | Pengembangan Wawasan Kebangsaaan | 0 | 0 | 0 | Bidang SDA |
|  |  |  |  | 2 | Peningkatan wawasan kebangsaan | 0 | 0 | 0 | Bidang SDA |
| 2 | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | 2.1 | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 1 | Peningkatan Kapasitas LINMAS | 0 | 0 | 0 | Bidang  Linmas |
| 2.2 | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 2 | Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak  Kriminal | 0 | 0 | 0 | Bidang penegakan perda dan bidang |
|  | 3 | Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban  dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | Bidang penegakan perda dan bidang trantibum |
| **TOTAL** | | | | | | **7.420.637.674** | **7.420.637.674** | **7.420.637.674** |  |

**LAMPIRAN 4 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPD** | **: Satuan Polisi Pamong Praja** |  |  |  |  |  |  |  |
| **No** | **Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah** | **Kondisi Kinerja pada awal periode**  **RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **Tahun 1** | **Tahun 2** | **Tahun 3** |  |  |
| **Tahun 0** |
| 1 | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | 10% | 10% | 20% | 50% |  |  | 50% |
| 2 | Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% |

#### 

#### LAMPIRAN 5 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN** | | **INDIKATOR KINERJA** | **PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN** | | | **SUMBER DATA** |
| **SASARAN RPJMD YANG DITUJU** | **SASARAN RENSTRA OPD** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | | | *6* |
| 1 | REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENGGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL | Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Biak Numfor | Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah | Ʃ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala  daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan | X | 100% | Berita Acara Pemeriksaan |
| Ʃ pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan |
| Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) | Ʃ Pelanggaran K3 yang Terselesaikan | X | 100% | Berita Acara Pemeriksaan |
| Ʃ Pelanggaran K3 yang Terdata |